INTISARI

Penelitian ini berujuan untuk mengetahui kemampuan keuangan daerah terutama Pemda induk sebelum dan sesudah penerapan otonomi daerah atau melakukan pemekaran daerah di Indonesia. Dalam penyelengaraan otonomi daerah, sesuai dengan di keluarkanya Undang-Undang No.32 tahun 2004 dan Undang-Undang No.33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan daerah antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Laporan keuangan meliputi Dana alokasi Umum, Dana alokasi Khusus dan Belanja Modal. Dalam penelitian ini menguji apakah pemda induk daerah otonomi baru dapat mandiri dan berhasil menjalankan otonomi baru dari segi keuangan terutama dari DAU, DAK dan Belanja Modal. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Sumber data dari dokumen dana perimbangan yang diperoleh dari situs website www.djpk.depkeu.go.id. Dari laporan dana perimbangan tahun 2005 – 2011 dapat diperoleh data mengenai jumlah anggaran Belanja Modal, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus.

Secara rata-rata Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus, ada perbedaan signifikan dengan adanya daerah otonomi baru dari pemda induk. Secara keseluruhan Dana alokasi umum pemda induk menunjukan perbedaan dan peningkatan dari tahun ke tahun setelah melakukan otonomi daerah sejak tahun 2007,2008 dan 2009, sedangkan secara rata-rata Belanja Modal tidak tidak ada perbedaan yang signifikan dengan adanya daerah otonomi. Secara keseluruhan Alokasi Belanja modal pemda induk menunjukan tidak terdapat perbedaan dan peningkatan dari tahun ke tahun setelah melakukan otonomi daerah

Kata Kunci : Pemekaran Daerah, Dana Perimbangan, Pemda induk dan Daerah Otonomi